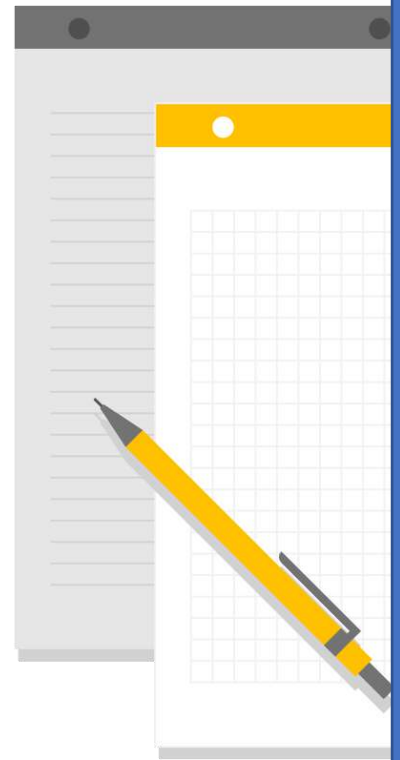


LKjIP

TRIWULAN II

TAHUN 2026



DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi Dinas, Badan dan Kantor yang bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar. Dokumen ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan. Selanjutnya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang. Adapun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk memenuhi Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang ada. Hal ini juga untuk mengetahui kemampuan Dinas/Instansi dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan maupun Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2025 - 2029 dan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2026 Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah

Dalam menyusun laporan mengacu pada dokumen perencanaannya, sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Demikianlah laporan ini kami buat untuk dapat diketahui, Akhirul kalam Wassalam Mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Juli 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**



Wasilun, S.Ag, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196708081999031010

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. GAMBARAN UMUM.....	6
1. Pendahuluan.....	6
2. Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi serta Organisasi.....	7
3. Tupoksi Jabatan Struktural.....	10
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	16
5. Sumber Daya Keuangan.....	22
6. Sarana dan Prasarana.....	26
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	33
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL.....	33
1. Visi.....	34
2. Misi.....	35
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama.....	36
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026.....	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
A. CAPAIAN KINERJA.....	46
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026.....	47
2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	50
3. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	63
4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	63
5. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	64
6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	64
B. REALISASI ANGGARAN.....	67
BAB IV PENUTUP.....	81
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN.....	81
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2026.....	17
Tabel 1.2	Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2026.....	18
Tabel 1.3	Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Eselonering Tahun 2026.....	18
Tabel 1.4	Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Kebutuhan Tahun 2026.....	19
Tabel 1.5	Tabel Rincian Belanja Triwulan II Tahun 2026.....	20
Tabel 1.6	Tabel Asset Triwulan II Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	26
Tabel 1.7	Tabel Asset Triwulan II Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Kebutuhan.....	30
Tabel 2.1	Misi dan Tujuan.....	37
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran.....	37
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama.....	38
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	39
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026.....	41
Tabel 2.6	Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial.....	44
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Dinas Sosial.....	44
Tabel 2.8	Alokasi Per Sasaran Strategis Pembangunan Tahun Anggaran 2026.....	45
Tabel 3.1	Nilai dan Kegiatan Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	46
Tabel 3.2	Sasaran Dinas Sosial	47
Tabel 3.3	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	49
Tabel 3.4	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2026.....	50
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2026.....	62
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026.....	62
Tabel 3.7	Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial.....	64
Tabel 3.8	Sasaran Strategis Dinas Sosial.....	65
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Operasi Triwulan II Tahun 2026.....	67
Tabel 3.10	Realisasi Program Dan Kegiatan Tahun 2026.....	68
Tabel 3.11	Realisasi Penyerapan Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 202.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi.....	9
Gambar 1.2	Peta Jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	21



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan II ini disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Adapun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan Kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel, merupakan harapan semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna,



bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa azaz umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azaz tertib penyelenggaraan negara, azaz kepentingan umum, azaz keterbukaan, azaz proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azaz akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan hal tersebut, Dinas Sosial diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan II Tahun 2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan II Tahun 2026 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama serta sasaran dengan yang telah ditetapkan per triwulannya. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi serta Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas



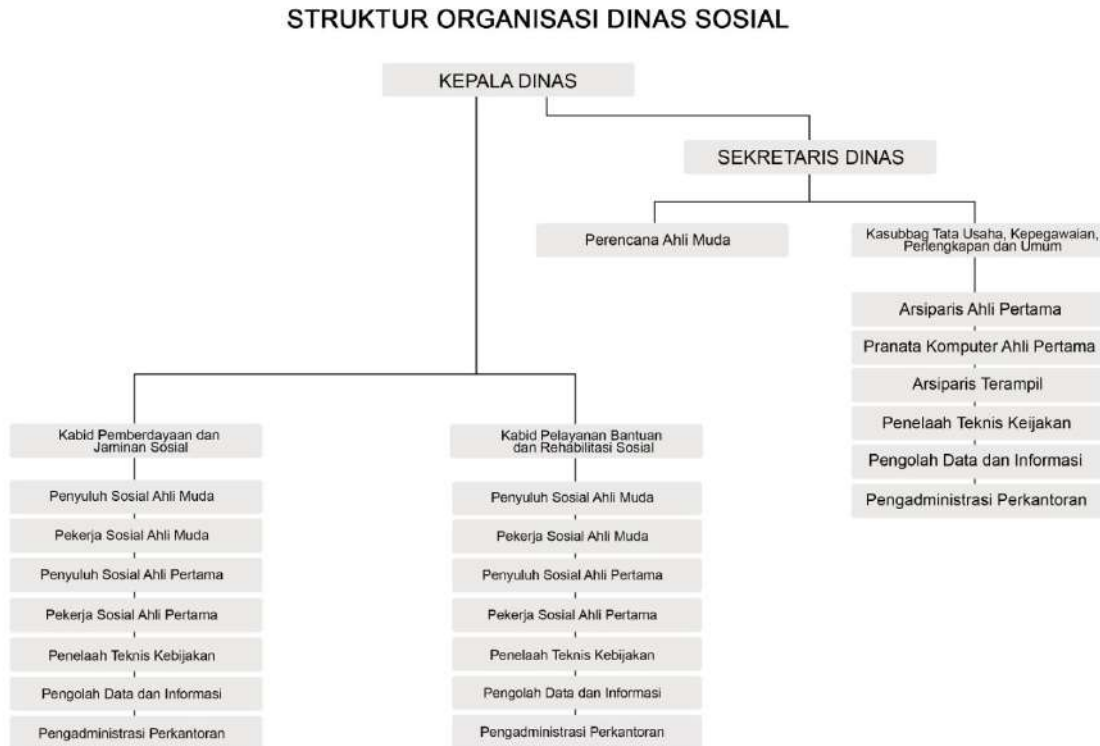
Sosial Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di bidang sosial;
- b. perumusan kebijakan dibidang sosial;
- c. penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan; pemerintahan serta pelayanan umum dibidang sosial;
- d. penyelenggaraan administrasi dinas;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sosial;
- f. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- g. pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya



Sumber Data : Subbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum Tahun 2026

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
3. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial;
4. Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial;
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



3. Tupoksi Jabatan Struktural

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

I. KEPALA DINAS

Tugas Pokok :

Memimpin dan merumuskan program kerja pada Dinas Sosial dalam rangka mengkoordinasi, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas Sosial.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran strategis dinas;
- b. perumusan dan pelaksanaann kebijakan teknis dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang dinas;
- d. pengarahan pelaksanaan program kerja dinas;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan program bidang sosial;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum



Fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di dinas sosial;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyediaan dan pengatur penyelenggaraan tugas di dinas sosial;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja dan keuangan serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan;
- e. pengendalian kegiatan di dinas sosial;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di dinas sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

- **Sub Bagian Tu, Kepegawaian Perlengkapan Dan Umum**

Tugas :

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan Umum.

Fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub bagian tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bagian tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;

- f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang Pemberdayaan dan jaminan sosial Memimpin dan melaksanakan program operasional pada Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial.

Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di bidang pemberdayaan dan jaminan sosial;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyediaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan dan jaminan sosial;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan dan jaminan sosial;
- f. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan jaminan sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



IV. KEPALA BIDANG PELAYANAN, BANTUAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang bantuan sosial dan korban bencana alam, tuna sosial anak dan korban NAPZA, serta penyandang disabilitas, lanjut usia dan orang terlantar.

Fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di bidang pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyediaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bantuan sosial dan korban bencana alam, tuna sosial anak dan korban napza;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di bidang pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan

melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

Penetapan rincian, tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan koordinator dan/atau sub koordinator kelompok JF sebagaimana dimaksud ayat 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

1. Perencana Ahli Muda

Tugas :

Tugas jabatan fungsional perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Fungsi :

- a. menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- b. indentifikasi masalah/ issue strategis;
- c. menyusun kebijakan rencana pembangunan;
- d. adopsi dan legitimasi rencana pembangunan; dan
- e. pelaksanaan rencana pembangunan.

2. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pelayanan Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.

Tugas :

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang

disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik

Fungsi :

- a. melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- b. diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- c. melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- d. melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- e. melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- f. melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota; dan
- g. membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta.

3. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial

Tugas :

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik.

Fungsi :

- a. menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan daerah non rawan sosial;
- b. penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga daerah non rawan sosial;
- c. melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;

- d. membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
- e. melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- f. melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota; dan
- g. melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.

VI. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Unit pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada. Kualitas SDM di suatu Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 sebagai berikut :



Tabel 1.1
SUMBER DAYA APARATUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2026

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	S-2	2 orang	8%
2.	S-1	13 orang	52 %
3.	Diploma	3 orang	12 %
4.	SLTA	7 orang	28 %
Jumlah		25 orang	100%

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial Kab.Kubu Raya, 2026

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personel Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2026 adalah Sarjana (S1) 13 orang atau 52% dan yang berpendidikan S2 (Pasca Sarjana) 2 orang yaitu 8%, Diploma sebanyak 3 orang atau 12% sedangkan SLTA/Sederajat sebanyak 7 orang atau 28%. Adapun di Tahun 2026 ini penambahan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu sebanyak 4 Orang yaitu berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 2 orang, Diploma (D3) sebanyak 3 Orang dan SLTA/Sederajat sebanyak 1 orang. Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paru Waktu sebanyak 7 Orang yaitu berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 2 orang dan SLTA/Sederajat sebanyak 5 orang. Jadi secara umum sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik pada tahun 2026.

Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:



Tabel 1.2
SUMBER DAYA APARATUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2026

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	2 orang	11%
2.	Penata	11 orang	60%
3.	Pengatur	1 Orang	6%
4.	Golongan IX	2 Orang	11%
5.	Golongan VII	1 Orang	6%
6.	Golongan V	1 Orang	6%
Jumlah		18 orang	100%

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial, 2026

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut diketahui bahwa secara umum sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2026 berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Pembina 11 %, Penata 60 %, Pengatur 6 %, Golongan IX 6 %, Golongan VII 6 % dan Golongan V 6 %. Sedangkan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paru Waktu yang sebanyak 7 Orang belum memiliki pangkat/golongan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan esselonering, dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut:



Tabel 1.3
SUMBER DAYA APARATUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN ESELONERING TAHUN 2026

NO.	ESELON	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	II	1 orang	7 %
2.	III	2 orang	15 %
3.	IV	1 Orang	7%
4.	Fungsional	3 orang	21 %
5.	Pelaksana	7 orang	50 %
Jumlah		14 orang	100 %

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial, 2026

Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sudah terisi, sampai saat ini Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga Pelaksana teknis di bidang sosial dan dibantu oleh tenaga PPPK Paru Waktu sebanyak 7 orang dan juga tenaga Outsourcing sebanyak 3 orang dengan berlatar belakang pendidikan Sarjana dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Adapun kekurangan tenaga pelaksana teknis di dinas sosial tersebut di sebutkan dalam tabel berikut :



Tabel 1. 4
SUMBER DAYA APARATUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN KEBUTUHAN TAHUN 2026

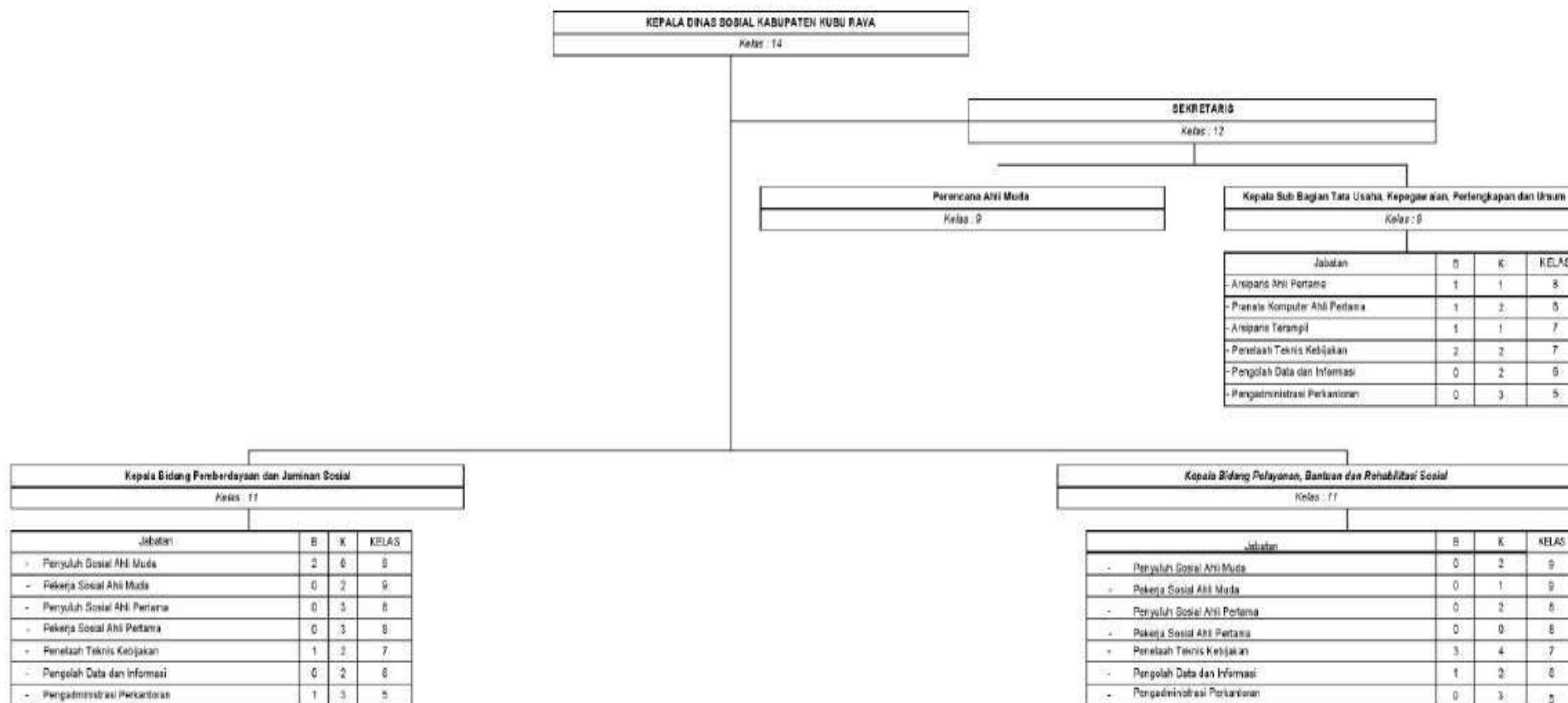
NO.	JABATAN	KEBUTUHAN
(1)	(2)	(3)
1.	Subbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum	
	1. Arsiparis Ahli Pertama	1
	2. Pranata Komputer Ahli Pertama	2
	3. Arsiparis Terampil	1
	4. Penelaah Teknis Kebijakan	2
	5. Pengolah Data dan informasi	2
	6. Pengadministrasi Perkantoran	3
2.	Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial	
	1. Penyuluh Sosial Ahli Muda	0
	2. Pekerja Sosial Ahli Muda	2
	3. Penyuluh Sosial Ahli Pertama	3
	4. Pekerja Sosial Ahli Pertama	3
	5. Penelaah Teknis Kebijakan	2
	6. Pengolah Data dan Informasi	2
	7. Pengadministrasi Perkantoran	3
3.	Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial	
	1. Penyuluh Sosial Ahli Muda	1
	2. Pekerja Sosial Ahli Muda	1
	3. Penyuluh Sosial Ahli Pertama	2
	4. Pekerja Sosial Ahli Pertama	0
	5. Penelaah Teknis Kebijakan	4
	6. Pengolah Data dan Informasi	2
	7. Pengadministrasi Perkantoran	3
TOTAL		39

Sumber Data : Subbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum

Berdasarkan Tabel 1.4 tersebut bahwa diketahui disemua bidang Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya membutuhkan tenaga pegawai sesuai jabatan yang disebutkan guna mencapai kinerja yang berkualitas dan mempercepat semua kegiatan yang ada Dinas Sosial.

Gambar 1.2

PETA JABATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2026
KABUPATEN KUBU RAYA



Sumber : Subbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum Tahun 2026



5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana yang disediakan untuk penyelenggaraan kegiatan Belanja Operasi pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026 adalah Rp 5.193.819.930,21,- Berasal dari sumber dana APBD tahun 2026. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5
Rincian Belanja Triwulan II
Tahun 2026

KODE REKENING	URA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.830.457.680,21	1.688.132.070,00	2.142.325.610,21	44,07%
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.861.000,00	0,00	7.861.000,00	0,00%
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.892.000,00	0,00	7.892.000,00	0,00%
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.587.000,00	0,00	7.587.000,00	0,00%
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.780.000,00	7.601.820,00	178.180,00	97,71%
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.791.000,00	0,00	7.791.000,00	0,00%
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.536.0000,00	10.406.400,00	129.600,00	98,77%
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.510.000,00	0,00	7.510.000,00	0,00%
1.06.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	8.031.366,00	7.914.450,00	116.916,00	98,54%
1.06.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	9.2000.000,00	0,00	9.2000.000,00	0,00%
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.850.079.974,21	1.192.094.009,00	1.658.030.965,21	41,83%
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	34.042.000,00	11.810.000,00	22.232.000,00	34,69%



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.374.000,00	1.237.560,00	136.440,00	90,07%
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00	0,00%
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.400.000,00	1.320.520,00	79.480,00	94,32%
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.352.500,00	1.265.198,00	6.087.302,00	17,21%
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00	0,00%
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.266.000,00	4.025.850,00	240.150,00	94,37%
1.06.01.2.05.01 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15.0000.000,00	0,00	15.0000.000,00	0,00%
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.676.000,00	10.148.000,00	36.528.000,00	21,74%
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.760.000,00	3.153.500,00	9.606.500.000,00	24,71%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.908.000,00	7.944.000,00	40.964.000,00	16,24%
1.06.01.2.06.01 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.952.000,00	0,00	4.952.000,00	0,00%
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.450.000,00	198.000.000,00	2.450.000,00	98,78%
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.412.000,00	26.700.000,00	32.712.000,00	44,94%
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	328.181.840,00	166.786.080,00	161.395.760,00	50,82%
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.510.000,00	14.395.234,00	28.114.766,00	33,86%
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	77.910.000,00	23.374.449,00	54.535.551,00	30,00%



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.050.000,00	0,00	17.050.000,00	0,00%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	269.549.200,00	13.668.000,00	255.881.200,00	5,07%
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60.918.000,00	9.868.000,00	51.050.000,00	16,20%
1.06.02.2.03.010	Fasilitas Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	59.815.200,00	0,00	59.815.200,00	0,00%
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	148.816.000,00	3.800.000,00	145.016.000,00	2,55%
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	136.473.000,00	9.400.000,00	127.073.000,00	6,89%
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	12.905.000,00	0,00	12.905.000,00	0,00%
1.06.04.2.01.002	Penyediaan Sandang	9.739.000,00	0,00	9.739.000,00	0,00%
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	50.998.000,00	0,00	50.998.000,00	0,00%
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik,	10.653.000,00	1.800.000,00	8.853.000,00	16,90%



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

	Mental, Spiritual dan Sosial				
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.606.000,00	0,00	2.606.000,00	0,00%
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
1.06.04.2.01.010	Pemberian Layanan Kedaruratan	21.170.000,00	7.600.000,00	13.570.000,00	35,90%
1.06.04.2.01.011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	0,00%
1.06.04.2.01.012	Pemberian Layanan Rujukan	9.816.000,00	0,00	9.816.000,00	0,00%
1.06.04.2.01.014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00%
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	6.926.000,00	0,00	6.926.000,00	0,00%
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.998.000,00	0,00	2.998.000,00	0,00%
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	913.627.000,00	14.538.000,00	899.089.000,00	1,59%
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	802.560.000,00	2.048.000,00	800.512.000,00	0,26%
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12.581.500,00	0,00	12.581.500,00	0,00%
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	35.737.500,00	0,00	35.737.500,00	0,00%



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	30.399.000,00	3.040.000,00	27.359.000,00	10,00%
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah SKabupaten/Kota	32.349.000,00	9.450.000,00	22.899.000,00	29,21%
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	42.213.050,00	0,00	42.213.050,00	0,00%
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	22.043.050,00	0,00	22.043.050,00	0,00%
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	17.270.000,00	0,00	17.270.000,00	0,00%
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00%
TOTAL		5.193.819.930,21	1.725.738.070,00	3.468.081.860,21	33,23%

Berdasarkan Tabel 1.5 terlihat bahwa serapan atau realisasi Belanja Barang dan Jasa triwulan II tahun 2026 sebesar **Rp. 1.725.738.070,00** dengan persentase sebesar 33,23%. Dengan ini dapat dikatakan bahwa anggaran Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya belum dapat terserap dan direalisasikan dengan baik.

6. Sarana dan Prasarana

Untuk saat ini Dinas Sosial masih melakukan penyewaan untuk kegiatan gedung kantor. Tersedianya 1 (satu) lokasi gedung Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berlokasi di Jalan Supadio No 16, Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Adapun Asset yang ada di Kantor Dinas Sosial saat ini sebagai berikut :

Tabel 1.6
TABEL ASSET TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

NO	Kode Barang	Merk/ Type	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
2	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
3	Meubeleur lainnya	420x505x875 mm	Baik
4	Filing Cabinet Besi	465x620x1320 mm	Baik
5	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	62x45x50 mm	Baik
6	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	62x45x50 mm	Baik



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

NO	Kode Barang	Merk/ Type	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	85x180	Baik
8	Kursi Besi/Metal	62x60x78 mm	Baik
9	Filing Cabinet Besi	465x620x1320 mm	Baik
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44,5x25 cm	Baik
11	Kursi Besi/Metal	40x40x43 mm	Baik
12	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60x120x75	Baik
13	P.C Unit	22 inci	Baik
14	P.C Unit	22 inci	Baik
15	Lap Top	14 inci	Baik
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44,5x25 cm	Baik
17	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1500	Baik
18	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	85x180	Baik
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	482x22x130 mm	Baik
20	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2500	Baik
21	A.C. Split	1/2 pk	Baik
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	69x69x101 mm	Baik
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	69x69x101 mm	Baik
24	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	85x80	Baik
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	461x215x130 mm	Baik
26	Filing Cabinet Besi	465x620x1320 mm	Baik
27	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
28	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
29	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
30	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
31	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
32	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
33	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
34	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
35	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
36	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
37	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
38	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
39	A.C. Split	1 PK	Baik



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

NO	Kode Barang	Merk/ Type	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
40	A.C. Split	1 PK	Baik
41	A.C. Split	1/2 PK	Baik
42	A.C. Split	1/2 PK	Baik
43	A.C. Split	1/2 PK	Baik
44	A.C. Split	1/2 PK	Baik
45	Televisi	40 INCH	Baik
46	Tangki Air	300 Liter	Baik
47	Lemari Arsip Pejabat lainnya	85x180	Baik
48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	502x250x616 mm	Baik
49	P.C Unit	19 inci	Baik
50	Lap Top	14 inci	Baik
51	Lap Top	14 inci	Baik
52	Lap Top	14 inci	Baik
53	Lap Top	14 inci	Baik
54	Hard Disk	2 TB	Baik
55	Hard Disk	2 TB	Baik
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	461x215x130 mm	Baik
57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	375x347x179 mm	Baik
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	375x347x179 mm	Baik
59	Sepeda Motor	155	Baik
60	Meja Kerja Pejabat Eselon II	50x120x75	Baik
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60x120x75	Baik
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60x120x75	Baik
63	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	50x120x75	Baik
64	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40x40x43 cm	Baik
65	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40x40x43 cm	Baik
66	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40x40x43 mm	Baik
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40x40x43 mm	Baik
68	Lemari Arsip Pejabat lainnya	85x180	Baik
69	Lemari Arsip Pejabat lainnya	85x180	Baik
70	P.C Unit	21.5	Baik
71	P.C Unit	21.5 inci	Baik



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

NO	Kode Barang	Merk/ Type	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
72	Lap Top	10 inci	Baik
73	Lap Top	14,0 inci	Baik
74	Lap Top	14 inci	Baik
75	Lap Top	14 inci	Baik
76	Lap Top	15.6 inci	Baik
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	375x347x237 mm	Baik
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	435x380x159 mm	Baik
79	Printer (Peralatan Personal Komputer)	435x380x159 mm	Baik
80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	375x347x179 mm	Baik
81	Sepeda Motor	155	Baik
82	Sepeda Motor	155	Baik
83	Sepeda Motor	155	Baik
84	Sepeda Motor	155	Baik
85	Sepeda Motor	155	Baik
86	Sepeda Motor	155	Baik
87	Mesin Absen (Time Recorder)	19,3x16,5x8,6 cm	Baik
88	Lemari Kaca	103x40x168 mm	Baik
89	Lemari Kaca	103x40x168 mm	Baik
90	Lemari Kaca	103x40x168 mm	Baik
91	Lemari Kaca	103x40x168 mm	Baik
92	A.C. Split	1 PK	Baik
93	A.C. Split	1 PK	Baik
94	A.C. Split	2 PK	Baik
95	Kipas Angin	9	Baik
96	Kipas Angin	16	Baik
97	Kipas Angin	18	Baik
98	Kipas Angin	16	Baik
99	Kipas Angin	18	Baik
100	Kipas Angin	16	Baik
101	Kipas Angin	16	Baik
102	Kipas Angin	16	Baik
103	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	62x45x50 mm	Baik
104	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	62x45x50 mm	Baik
105	Kursi Kerja Pejabat lainnya	69x69x101 mm	Baik
106	Kursi Kerja Pejabat lainnya	69x69x101 mm	Baik
107	Kursi Kerja Pejabat lainnya	69x69x101 mm	Baik



NO	Kode Barang	Merk/ Type	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
108	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II		Baik
109	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	240x45x180 cm	Baik
110	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	240x45x180 cm	Baik
111	Uninterruptible Power Supply (UPS)	502x250x616 mm	Baik
112	Uninterruptible Power Supply (UPS)	502x250x616 mm	Baik
113	P.C Unit	21,5 inci	Baik
114	P.C Unit	21,5 inci	Baik
115	Lap Top	14 inci	Baik
116	Lap Top	14 inci	Baik
117	Lap Top	14 inci	Baik
118	Printer (Peralatan Personal Komputer)	375x380x237 mm	Baik
119	Printer (Peralatan Personal Komputer)	48X45X28 cm	Baik

Sumber Data : Subbag TU, Kepegawaian Perlengkapan dan Umum, tahun 2026

Berdasarkan kebutuhan kantor sebagai penunjang kegiatan dan pekerjaan saat ini masih memerlukan beberapa sarana dan prasarana sebagai alat untuk mencapai pekerjaan yang diinginkan sebagai berikut :

Tabel 1.7
TABEL ASSET TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN KEBUTUHAN

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sepeda Motor	18	Unit
2	AC 2 PK	20	Unit
3	AC 1 PK	20	Unit
4	PC	18	Unit
5	LED PROJECTOR/INFOCUS	2	Unit



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pembangunan Kesejahteraan sosial di Indonesia khususnya di Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disuatu sisi dan penurunan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya, yakni adanya peningkatan produktivitas PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PPKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih Tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya;
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas;
3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain;



4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran;
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri;
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal;
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas;
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal;
9. Tidak memiliki fasilitas kantor yang memadai untuk melayani aduan masyarakat terutama keluarga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH;
10. Tidak memiliki *shelter* (rumah singgah) untuk menampung sementara Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia Terlantar dan ABH;
11. Memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang masih minim untuk memfasilitasi pengantaran dan/atau penjemputan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dari/atau ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kota Singkawang, Orang Terlantar (OT), Lansia terlantar dan ABH dari atau ke Kabupaten Kota se-Kalbar; dan
12. Memiliki anggaran APBD yang sangat kecil sehingga membatasi pelayanan Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia Terlantar dan ABH.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang bersifat *outcome* yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya.

Rencana Strategis Dinas Sosial telah diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dengan mengacu RPJM-D Kabupaten Kubu Raya dimana penyusunannya juga telah diupayakan menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis.

Perumusan Rencana Strategis (Renstra) merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting. Adapun alur pemikiran yang dimaksud dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) haruslah mengacu

pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi Perangkat Daerah.

Visi dan Misi Perangkat Daerah ini memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

1. Visi

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang utuh. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari tahapan perencanaan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029.

Renstra pada periode ini merupakan Renstra transisi yang disusun sebelum penetapan visi dan misi Bupati Terpilih. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa

dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, bahwa Visi Kabupaten Kubu Raya dari Kepala Daerah terpilih adalah **“Terwujudnya Kubu Raya Melaju (Melayani Untuk Maju).”**

2. Misi

Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan Peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 3 (Tiga) Misi sebagai berikut:

- a. meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, efektif, efisien, akuntabel, dan digitalisasi;
- b. meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah yang layak, merata dan berkualitas; dan
- c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif serta pemberdayaan masyarakat madani humanis dan religius.

Visi dan Misi pembangunan tersebut selanjutnya menjadi pedoman Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk pelaksanaannya sesuai tupoksi Perangkat Daerah, ketiga Misi Pembangunan tersebut secara implisit memberikan arahan bagi Dinas Sosial Kabupaten

Kubu Raya untuk menangani Tugas Sosial terutama pada penekanan Misi ke 1 (Satu) yaitu Meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, efektif, efisien, akuntabel, dan digitalisasi

Visi Dinas Sosial dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2025-2029. Visi dari Dinas Sosial adalah “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri dan Harmonis”.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

3.1. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah di capai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas Sosial menetapkan tujuan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan harmonis	Meningkatnya transparansi akuntabilitas kinerja dan keuangan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat

3.2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasaran yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatnya transparansi akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya transparansi akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP
Meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial

3.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, maka ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya. Berikut tabel tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (73)
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	56,05%

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya untuk mencapai tujuan, sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu maksud tertentu.



Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

Visi 1		Terwujudnya Kubu Raya Melaju (Melayani dan Maju)					
Misi 1		Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri dan Harmonis					
Tujuan		1. Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat					
Sasaran		1. Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					
		2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Meningkatkan Nilai SAKIP pada Unit Kerja	1	Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP
2	Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat	2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	2	Peningkatan kualitas program pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi PPKS

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Perjanjian Kinerja tahun 2026 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan



terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2026.

Tujuan perjanjian kinerja sesuai Peraturan Presiden pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 :

- 1) sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan
- 5) sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada rencana strategis tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	NILAI SAKIP	BB (73)
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	56.05%

Adapun program - program pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dimaksud sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
- 2) Program Pemberdayaan Sosial;
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- 4) Program Rehabilitasi Sosial;
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- 6) Program Penanganan Bencana.

Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai penyelenggara kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya khususnya terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2025-2029. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2025-2029.

Tujuan dari penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya ialah mewujudkan Kesejahteraan Sosial di masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta peningkatan peran partisipasi aktif kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Potensi

dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diuraikan, tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, maka selanjutnya akan dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

1. Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, yaitu :

- 1) metode interaksi antara faktor *strengths* dengan faktor *opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- 2) metode interaksi antara faktor *strengths* dengan faktor *threats* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman;
- 3) metode interaksi antara faktor *weaknesses* dengan faktor *opportunities* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan; dan
- 4) metode interaksi antara faktor *weaknesses* dengan faktor *threats* dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

2. Melalui metode diatas, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menetapkan isu strategis :

1. Masih tingginya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya;
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas;

3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain;
4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran;
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri;
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan belum terdayagunakan secara optimal;
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas;
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal;
9. Tidak memiliki fasilitas kantor yang memadai untuk melayani aduan masyarakat terutama keluarga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar Dan ABH;
10. Tidak memiliki *shelter* (rumah singgah) untuk menampung sementara Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia Terlantar dan ABH;
11. Memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang masih minim untuk memfasilitasi pengantaran dan/atau penjemputan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dari atau ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) kota singkawang, Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH dari atau ke Kabupaten kota se-Kalbar; dan
12. Memiliki anggaran APBD yang sangat kecil sehingga membatasi pelayanan orang terlantar (ot), orang dalam gangguan jiwa (odgj), lansia terlantar dan abh;



3. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

Tabel 2.6
Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (75)	BB (73)	BB (73,50)	BB (74)	BB (74,50)	BB (75)
2	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Rasio Gini	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	90%	56,05%	56,15%	56,25%	56,35%	56,50%
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka								

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Dinas Sosial

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 269.549.200	APBD
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 1.500.000	APBD
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 136.473.000	APBD
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 913.627.000	APBD
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 42.213.050	APBD
TOTAL	Rp. 1.363.362.250	APBD

Alokasi anggaran belanja tahun 2026 yang terealisasi dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :



Tabel 2.8
Alokasi Per Sasaran Strategis Pembangunan
Tahun Anggaran 2026

No.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	KET
		(Rp)	(Rp)	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 269.549.200	Rp. 13.668.000	APBD
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 1.500.000	Rp. 0	APBD
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 136.473.000	Rp. 9.400.000	APBD
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 913.627.000	Rp. 14.538.000	APBD
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 42.213.050	Rp. 0	APBD
TOTAL		Rp. 1.363.362.250	Rp. 37.606.000	APBD

Pada tabel di atas, Anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program / kegiatan prioritas, belum adanya jumlah anggaran yang terealisasi dikarenakan kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya adapun total anggaran belanja sebesar **Rp. 1.363.362.250,-** dan total realisasi belanja sebesar **Rp. 37.606.000,-**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya selama Tahun 2026 dapat diukur dan di sajikan dalam akuntabilitas kinerja ini. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Akuntabilitas kinerja di mulai dengan pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan persentase antara rencana tingkat capaian dengan realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2026. Presentase pencapaian target hanya didasarkan pada perhitungan realisasi dari target yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang dicapai pada Tahun 2026.

Berdasarkan Skala Penilaian sesuai Permenpan RB No. 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) sebagai acuan instansi pemerintah menilai kinerja secara berjenjang. Peraturan ini menjadi dasar bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja, dengan hasil akhir berupa predikat kinerja yang dapat mempertimbangkan ekspektasi pimpinan satu tingkat di atasnya.

Tabel 3.1
Nilai dan Kategori Predikat
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Nilai	Kategori/Predikat
1.	> 90 – 100	AA/Sangat Memuaskan
2.	> 80 – 90	A/Memuaskan
3.	> 70 – 80	BB/Sangat Baik
4.	> 60 – 70	B/Baik



5.	> 50 – 60	CC/Cukup
6.	> 30 – 50	C/Kurang
7.	> 0 – 30	D/Sangat Kurang

Sumber : Permenpan RB No. 22 Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.2
Sasaran Strategis Dinas Sosial

No.	SASARAN STRATEGIS DINAS SOSIAL	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	N/A
			73	
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	56,05%	N/A

Sumber : Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

Berikut ini perolehan capaian IKU Triwulan II tahun 2026 beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya :

- **Penjelasan**

Data Indeks Kesejahteraan Sosial belum dapat direalisasikan per triwulan karena penyusunannya bergantung pada ketersediaan data dasar. Selain itu, proses validasi, pengolahan, dan perhitungan indeks memerlukan waktu untuk menjamin kualitas dan keakuratan hasil, sehingga nilai indeks belum dapat disajikan setiap triwulan."

IKESOS

$$= \frac{\sum 1 \text{ Dimensi}}{\text{Jumlah Dimensi}}$$

Keterangan:

- IKESOS = Indeks Kesejahteraan Sosial.
- $D_1, D_2, D_3, \dots, D_n$ = Nilai masing-masing dimensi penyusun indeks yang telah dihitung atau dinormalisasi ke dalam skala yang sama (misalnya 0–100).
- n = Jumlah dimensi penyusun indeks.

Penjelasan Formula

Formula tersebut menggunakan metode rata-rata aritmetika (arithmetic mean), yaitu menjumlahkan seluruh nilai dimensi penyusun Indeks Kesejahteraan Sosial, kemudian membaginya dengan jumlah dimensi. Dengan metode ini, setiap dimensi memiliki bobot yang sama terhadap nilai akhir IKESOS.

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diperlukan dalam perhitungan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya karena merupakan dasar untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. Data PPKS tidak hanya menunjukkan jumlah sasaran yang membutuhkan pelayanan, tetapi juga menjadi acuan dalam menghitung cakupan layanan, efektivitas program, dan pencapaian indikator kinerja

Data PPKS memberikan informasi mengenai jumlah dan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan sosial, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya. Dengan demikian, Dinas Sosial dapat menetapkan target pelayanan secara tepat.

Jenis-jenis PPKS yang terlayani di Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya :

1. Anak Terlantar Diluar Panti Sosial;
2. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH);
3. Disabilitas;



4. Disabilitas Mental;
5. Korban Bencana Alam;
6. Korban Bencana Sosial;
7. Lansia Terlantar;
8. Orang Terlantar;
9. Gelandangan Dan Pengemis;
10. Mayat Terlantar; dan
11. Fakir Miskin

Tabel 3.3
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya

No.	NAMA	POPULASI	REALISASI
1	ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI SOSIAL		
2	ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)		
3	DISABILITAS	35	35
4	DISABILITAS MENTAL	4	4
5	KORBAN BENCANA ALAM	0	0
6	KORBAN BENCANA SOSIAL	32	32
7	LANSIA TERLANTAR	1	1
8	ORANG TERLANTAR	7	7
9	GELANDANG DAN PENGEMIS	14	14
10	MAYAT TERLANTAR	1	1
11	FAKIR MISKIN	471	0
TOTAL		565	94

Sumber : Realisasi Kinerja Dinas Sosial Tahun 2026

$$\text{Persentase Penanganan PPKS} = \frac{94}{565} \times 100$$

$$\text{Persentase Penanganan PPKS} = 16,64 \%$$

Tersedianya Data PPKS terbaru untuk bahan penentuan sasaran serta kerjasama yang baik antar instansi, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Penghitungan Persentase Penanganan PPKS dalam indikator fakir miskin menggunakan data berbasis pengaduan masyarakat saja, untuk data bantuan sosial fakir miskin baru dapat di realisasikan sepenuhnya pada



saat akhir tahun anggaran sesuai dengan SK Terakhir dari Kementerian Sosial mengenai Data Desil Fakir Miskin (yaitu desil 1-5) dan Data Bantuan PKH, PBI dan Sembako.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.4
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2026

Uraian Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Mendidik masyarakat untuk mandiri dengan usaha peningkatan pendapatan dan kesejahteraan yang dilakukan oleh penduduk dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia	Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan, agar tepat sasaran.
1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	0	Meningkatkan Kemampuan Potensi Pekerja agar bisa mandiri dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia	Memvalidasi dan pendataan Target Pekerja Sosial masyarakat yang akan diberikan sosialisasi dan koordinasi
1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	0	Meningkatkan Kemampuan Kelembagaan agar bisa mandiri dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.	Memvalidasi dan pendataan target kelembagaan masyarakat yang akan diberikan sosialisasi dan koordinasi.
1.3	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Bantuan Sosial bagi	8 Orang/Bulan	0	Memfasilitasi Pemberian Penghargaan dan Bantuan Sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional,	



	Warakawuri/Kelu arga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan			Perintis Kemerdekaan dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAAN					
1	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	5 Orang		Sebelum melaksanakan program tersebut kita harus mempunyai validasi data warga negara migran korban tindak kekerasan	Validasi data harus dilaksanakan agar dapat memberikan solusi untuk pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan.
1.1	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	0	Sebelum melaksanakan program tersebut kita harus mempunyai validasi data warga negara migran korban tindak kekerasan	Validasi data harus dilaksanakan agar dapat memberikan solusi untuk pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan.
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	100 %		Untuk atensi Kegiatan Rehabiliatsi sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Aank Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial harus menggunakan pendekatan berbasis keluarga,komunitas,resi densial melalui kegiatan	Mengimplementasika n rencana program dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan penganggaran yang telah ditetapkan



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

				yang mendukung pelayanan sosial	
1.1	Penyediaan Permakanan	5 Orang	22 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan fasilitasi Makanan sesuai dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Fasilitasi Makanan dengan tepat sasaran
1.2	Penyediaan Sandang	12 Orang	22 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan fasilitasi sandang sesuai dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Fasilitasi sandang dengan tepat sasaran
1.3	Penyediaan Alat Bantu	17 Orang	0	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan fasilitasi Alat Bantu sesuai dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Fasilitasi Alat Bantu dengan tepat sasaran
1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10 Orang	21 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan fasilitasi Pelayanan Reunifikasi Keluarga sesuai dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan tepat sasaran
1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiriitual dan Sosial	15 Orang	61 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Fasilitasi Pemberian



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

				memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan fasilitasi Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial sesuai dengan keadaan dilapangan	Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan tepat sasaran
1.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	50 Orang	50 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan fasilitasi Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dengan tepat sasaran
1.7	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dengan tepat sasaran
1.8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10 Orang	61 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan Layanan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Layanan Data dan Pengaduan dengan tepat sasaran



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

				Data dan Pengaduan dengan keadaan dilapangan	
1.9	Pemberian Layanan Kedaruratan	10 Orang	61 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan Layanan Kedaruratan dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Layanan Kedaruratan dengan tepat sasaran
1.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10 Orang	22 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Pelayanan Penelusuran Keluarga dengan tepat sasaran
1.11	Pemberian Layanan Rujukan	10 Orang	26 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan Layanan Rujukan dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Layanan Rujukan dengan tepat sasaran
2	Fasilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	100%	100%	Untuk atensi Kegiatan Rehabiliatsi sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Aank Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial harus menggunakan pendekatan berbasis keluarga,komunitas,resid ensial melalui kegiatan	Mengimplementasikan rencana program dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan penganggaran yang telah ditetapkan



				yang mendukung pelayanan sosial	
2.1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	50 Orang	61 Orang	Melalui Pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan residensial kita dapat memperoleh data PPKS yang berhak mendapatkan fasilitasi pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA sesuai dengan keadaan dilapangan	Pendampingan terhadap PMKS bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dilaksanakan hingga tuntas sesuai dengan kasus yang dihadapi
2.2	Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5 Orang	19 orang	Melalui Pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan residensial kita dapat memperoleh data PPKS yang berhak mendapatkan Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar sesuai dengan keadaan dilapangan	Pendampingan terhadap PMKS Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dilaksanakan hingga tuntas sesuai dengan kasus yang dihadapi
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
1	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100 Persen	100 Persen	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	
1.1	Rujukan Anak-anak terlantar	10 Orang	0	Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	
1.2	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	500 Orang	0	Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	



2	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Data Pengelolaan Fakir Miskin yang Valid	Kurangnya Transparansi Data serta Regulasi Penyaluran Bantuan dari Kementerian Sosial Sehingga menyulitkan melakukan pendataan Fakir Miskin yang mendapat Bantuan
2.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.000 Orang	347 Orang	Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dengan sistem yang tersedia, serta Penyaluran Bantuan tepat sasaran sesuai dengan data yang tersedia	Inovasi Baru terhadap sistem pendataan dan pengelolaan fakir Miskin agar lebih akurat
2.2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	200 Orang	0		
2.3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	400 Keluarga	124 Orang	Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dengan sistem yang tersedia, serta Penyaluran Bantuan tepat sasaran sesuai dengan data yang tersedia	Inovasi Baru terhadap sistem pendataan dan pengelolaan fakir Miskin agar lebih akurat
2.4	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	400 Keluarga	124 Orang	Verifikasi dan Validasi Data fakir Miskin dengan sistem yang tersedia serta penyaluran bantuan tepat sasaran sesuai dengan data yang tersedia	Inovasi baru terhadap sistem pendataan dan pengelolaan fakir miskin agar lebih akurat
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Pendataan dan Penanganan Bantuan dengan sigap dan tepat sasaran	Inovasi dan Bekerja sama dengan berbagai sektor Penanggulangan Bencana
1.1	Penyediaan Makanan	206 Orang	32 Orang	Program Penyaluran Bantuan Makanan bagi Warga Terdampak	Inovasi baru terkait Pendataan Bantuan agar tepat sasaran



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

				Bencana dengan sigap dan Cepat	dan sesuai target serta data korban disajikan dengan lebih akurat
1.2	Penyediaan Sandang	30 Orang	32 Orang		
1.3	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	0	Pemberdayaan Masyarakat Tanggap Darurat Bencana	Apresiasi terhadap Masyarakat Tanggap Bencana, serta Sosialisasi dan pelatihan agar lebih sigap dalam penanganan bencana
1.4	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	24 Orang	47 Orang	Pemberdayaan Masyarakat Tanggap Darurat Bencana	Apresiasi terhadap Masyarakat Tanggap Bencana, serta Sosialisasi dan pelatihan agar lebih sigap dalam penanganan bencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	4 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
1.9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Data	0	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	23 Orang	0 Orang	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1312 Dokumen	335 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
2.3	Koordinasi dan Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang	Efisiensi anggaran yang telah disediakan



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			urusan pemerintah daerah	
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	17 Laporan	8 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
4.1	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	0	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	0	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
5.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17 Paket	4 Paket	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
5.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	2 Paket	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
5.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	29 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
5.4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Laporan	251 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	3 Unit	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	6 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan



7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39 Laporan	3 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43 Unit	0	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38 Unit	0	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan

Dari Tabel diatas analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi dalam pencapaian tujuan, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan program secara jelas dan spesifik. Tujuan program harus sesuai dengan misi dan visi SKPD serta relevan dengan masalah yang diselesaikan;

2. Mengidentifikasi hasil yang diharapkan dan pelaksanaan program hasil dan perubahan yang terjadi pada kondisi awal setelah adanya intervensi program;
3. Menyusun indikator untuk setiap awal yang diharapkan indikator adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui apakah hasil telah tercapai atau tidak, indikator harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terbatas waktu; dan
4. Menetapkan sumber data dan metode pengumpulan data untuk setiap indikator. Sumber data adalah tempat atau dapat memberikan informasi tentang indikator.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Triwulan II
Tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran 2026	
			Target	Realisasi
1	Meningkatnya Penanganan PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100%	5,07%
2		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100%	0%
3		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100%	6,89%
4		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100%	1,59%
5		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100%	0%

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja Triwulan II
Tahun 2026

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran 2026	
			Target	Realisasi
1	MENINGKATNYA PENANGANAN PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100%	0%
2		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100%	0%
3		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100%	149,11%
4		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100%	13,22%
5		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100%	20,35%

Dapat dilihat pada tabel diatas, realisasi capaian kinerja total pada sasaran strategis belum tercapai dikarenakan program belum terlaksana dengan baik. Pada program rehabilitasi sosial dan program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang baru terlihat realisasi kinerjanya karena dari target sasaran strategis Dinas Sosial belum mendapatkan data secara optimal sehingga hanya melayani PPKS sesuai dengan SK yang ada dan data dari stakeholder yang masih belum optimal.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan data pada tabel diatas, belum dapat disimpulkan bahwa terdapat program dan kegiatan yang realisasinya belum mencapai target serta yang belum terlaksana. Hal tersebut disebabkan belum optimalnya pengumpulan dan pengolahan data serta belum terlaksananya seluruh kegiatan dari program yang ada. Oleh karena itu

perlu memaksimalkan kegiatan pendataan agar Dinas Sosial dapat mengolah data dengan lebih baik.

4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis Dinas Sosial	Indikator Kinerja Utama	Realisasi				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	84,67 %	99,21%	99,60%	74,79%	N/A

Sumber : Laporan realisasi keuangan Dinas Sosial Tahun 2026

Dari tabel diatas dapat kita lihat, bahwa Kinerja Dinas Sosial Triwulan II Tahun 2026 belum dapat di hitung realisasi target kinerja yang tahun 2026 dikarenakan penghitungan saat ini menggunakan . Pada akhir tahun akan dapat dilihat hasil dari pencapaian kinerja Dinas Sosial. Kalau dilihat pada tabel 3.7, Pertumbuhan Penanganan dan Pelayanan PPKS terlihat tidak baik di Tahun 2025, realisasi yang mengalami penurunan pada tahun lalu dikarenakan data jauh lebih akurat dan untuk penghitungan data fakir miskin menggunakan DTSEN. Disamping itu juga belum terlaksananya semua kegiatan yang menunjang persentase indikator kinerja di tahun 2026 ini.

5. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis.

Tabel 3.8
Sasaran Strategis Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra 2026	Realisasi					
				2022	2023	2024	2025	2026	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	56,05%	84,6%	99,21%	99,60%	74,79%	N/A	N/A

Sumber : Laporan realisasi keuangan Dinas Sosial Tahun 2026

Diketahui dari tabel di atas realisasi IKU untuk Triwulan II ini belum dapat diperoleh angka realisasinya, karena untuk penghitungan IKU dilakukan secara global atau di akhir tahun. Dan untuk meningkatkan realisasi pada IKU diharapkan agar setiap tahun anggaran terus meningkat sehingga penanganan semua jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik secara kualitas maupun kuantitas dapat tertangani.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

- **Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

Adapun sasaran dari Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Belum semua Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik secara kuantitas maupun kualitas dapat tertangani;
- 2) Minimnya Sarana dan Prasarana dalam penanganan PPKS;

- 3) Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bentuk dukungan personil baik kuantitas (jumlah) maupun kualitas;
- 4) Minimnya Anggaran untuk Penanganan Capaian SPM.;
- 5) Tidak memiliki fasilitas kantor yang memadai untuk melayani aduan masyarakat terutama keluarga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH;
- 6) Tidak memiliki *shelter* (rumah singgah) untuk menampung sementara Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan jiwa (ODGJ), Lansia Terlantar dan ABH;
- 7) Memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang masih minim untuk memfasilitasi pengantaran dan/atau penjemputan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dari atau ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Singkawang, Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH dari atau ke Kabupaten Kota se-Kalbar; dan
- 8) Memiliki anggaran APBD yang sangat kecil sehingga membatasi pelayanan Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lansia Terlantar.

• **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

- 1) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait di dalam daerah dan antar daerah dalam penanganan PPKS;
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana yang sesuai standar dalam mendukung pelayanan dan penanganan PPKS;
- 3) Penambahan Jumlah SDM (Pegawai) dan Pengusulan Pendidikan dan Latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sertifikasi untuk peningkatan kualitas SDM;
- 4) Penambahan/Peningkatan dan memprioritaskan anggaran Urusan Sosial Dasar dibandingkan dengan urusan pilihan dalam Pelaksanaan Pelayanan Minimal;
- 5) Diperlukan Kantor permanen (tidak menyewa) agar pelayanan kepada masyarakat Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ),

Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH menjadi lebih maksimal;

- 6) Diperlukan *Shelter* (Rumah Singgah) untuk menampung sementara Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia Terlantar dan ABH sebelum dilanjutkan ke Dinas Provinsi Kalbar dan/atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Kalbar;
- 7) Diperlukan penambahan fasilitas sarana prasarana berupa mobil atau motor untuk mendukung pengantaran dan penjemputan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dari atau ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Singkawang serta Orang terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH dari atau ke kabupaten atau kota se-Kalbar; dan
- 8) Diberikan tambahan alokasi anggaran sehingga pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kubu Raya khususnya Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH, dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan kinerja triwulan II Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya merupakan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap triwulannya sebagai pelaksanaan tugas - tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Rencana Strategis (renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Sistem AKIP) telah disusun dan telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, pengukuran dan penilaian kinerja Kepala Dinas didasarkan pada dokumen tersebut sebagai tolak ukur kinerja. Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, mendapatkan alokasi dana dari



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini pelaporan realisasi Dinas Sosial tahun 2026.

Realisasi anggaran tahun 2026 khususnya untuk belanja operasi pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Sebagai Berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Operasi
Triwulan II Tahun 2026

No.	KELOMPOK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI
1	BELANJA OPERASI	Rp. 5.193.819.930,21	Rp. 1.725.738.070,00
	JUMLAH	Rp. 5.193.819.930,21	Rp. 3.468.081.860,21

Sumber : Laporan realisasi keuangan Dinas Sosial Tahun 2026

Tabel 3.10
Realisasi Program Dan Kegiatan
Tahun 2026

Rincian	Anggaran	Realisasi	
		Realisasi Anggaran	Persentase (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.830.457.680,21	1.688.132.070,00	44,07%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.861.000,00	0	0%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.892.000,00	0	0%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.587.000,00	0	0%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.780.000,00	7.601.820,00	97,71%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.791.000,00	0	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.536.000,00	10.406.400,00	98,77%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.510.000,00	0	0%
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	8.031.366,00	7.914.450,00	98,54%
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	9.200.000,00	0	0%



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.850.079.974,21	1.192.049.009,00	41,83%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.042.000,00	11.810.000,00	34,69%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.374.000,00	1.237.500,00	90,07%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.383.000,00	0	0%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.400.000,00	1.320.520,00	94,32%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.352.500,00	1.265.198,00	17,21%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.562.000,00	0	0%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.266.000,00	4.025.850,00	94,37%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	0	0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.676.000,00	10.148.000,00	21,74%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.760.000,00	3.153.500,00	24,71%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.908.000,00	7.944.000,00	16,24%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.952.000,00	0	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.450.000,00	198.000.000,00	98,78%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.412.000,00	26.700.000,00	20,20%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	328.181.840,00	166.786.080,00	50,82%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.510.000,00	14.385.234,00	33,86%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.910.000,00	23.374.449,00	30,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.050.000,00	0	0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	269.549.200,00	13.668.000,00	5,07%



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60.918.000,00	9.868.000,00	16,20%
Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	59.815.200,00	0	0%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	148.816.000,00	3.800.000,00	2,55%
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.500.000,00	0	0%
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1.500.000,00	0	0%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	136.473.000,00	9.400.000,00	6,89%
Penyediaan Permakanan	12.905.000,00	0	0%
Penyediaan Sandang	9.739.000,00	0	0%
Penyediaan Alat Bantu	50.998.000,00	0	0%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.000.000,00	0	0%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.653.000,00	1.800.000,00	16,90%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.606.000,00	0	0%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.000.000,00	0	0%
Pemberian Layanan Kedaruratan	21.170.000,00	7.600.000,00	35,90%
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.762.000,00	0	0%
Pemberian Layanan Rujukan	9.816.000,00	0	0%
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	2.900.000,00	0	0%
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	6.926.000,00	0	0%



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.998.000,00	0	0%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	913.627.000,00	14.538.000,00	1,59%
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	802.560.000,00	2.048.000,00	0,26%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12.581.500,00	0	0%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	35.737.500,00	0	0%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	30.399.000,00	3.040.000,00	10,00%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	32.349.000,00	9.450.000,00	29,21%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	42.213.050,00	0	0%
Penyediaan Makanan	22.043.050,00	0	0%
Penyediaan Sandang	17.270.000,00	0	0%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	2.900.000,00	0	0%
TOTAL	Rp. 5.193.819.930,00	1.725.738.070,00	33,23%



Tabel 3.11
Realisasi Penyerapan Anggaran Sesuai
Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Uraian Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Efisiensi
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	4,58%	
1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	0	0%	Sedang dilaksanakan dengan baik walaupun terkadang ada kendala dan hambatan dalam koordinasi dikarenakan terkadang tidak semua dapat hadir dalam koordinasi
1.2	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	8 org/bulan	0	0%	
1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	1 Orang	1,81%	Kegiatan dilaksanakan dengan cukup baik walaupun belum sesuai target yang telah ditentukan karena sedang berjalan dengan target
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAAN					
1	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	5 Orang	0	0%	



1.1	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	5 Orang	0	0%	Dilaksanakan dengan baik dan tidak berjalan menuju target yang telah ditentukan
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	100 %	100 %		Kurangnya Pendataan dan Koordinasi serta Laporan dari Masyarakat terkait Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.1	Penyediaan Permakanan	5 Orang	22 Orang	4,4%	Keadaan yang tidak dapat di prediksi mengakibatkan sulitnya dalam menghitung realisasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberikan makanan
1.2	Penyediaan Sandang	12 Orang	22 Orang	1,83%	Kegiatan Penyediaan Sandang sudah cukup baik dan berjalan mencapai target
1.3	Penyediaan Alat Bantu	17 Orang	0	0%	Upgrade Alat Bantu dengan yang jauh lebih optimal sehingga mengurangi kuota pembelian alat bantu karena harga alat bantu yang lebih fungsional jauh lebih mahal dari yang sebelumnya telah di anggarkan
1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10 Orang	21 Orang	210%	Sudah cukup baik karna sudah berjalan mencapai target
1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiriitual dan Sosial	15 Orang	61 Orang	406%	Sudah Cukup baik karna sudah berjalan mencapai target



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

1.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	50 Orang	50 Orang	100%	Kegiatan ini dilaksanakan dengan Baik dan sesuai target
1.7	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10 Orang	61 Orang	610%	Dilaksanakan dengan baik
1.8	Pemberian Layanan Kedaruratan	10 Orang	61 Orang	610%	Dilaksanakan dengan baik
1.9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10 Orang	22 Orang	220%	Dilaksanakan dengan baik
1.10	Pemberian Layanan Rujukan	10 Orang	26 Orang	260%	Dilaksanakan dengan baik
1.11	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	0%	Fasilitasi Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis sedang dan akan dilaksanakan sesuai target
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial				
2.1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	50 Orang	61 Orang	122%	Sudah cukup baik karna sudah hampir mencapai target



2.2	Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5 Orang	19 Orang	380%	Sudah cukup baik karna sudah hampir mencapai target
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
1	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100%	100%		Kurangnya Transparansi Data serta Regulasi Penyaluran Bantuan dari Kementerian Sosial Sehingga menyulitkan melakukan pendataan Fakir Miskin yang mendapat Bantuan
1.1	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	500 Orang	0	0%	Kurangnya Transparansi Data serta Regulasi Penyaluran Bantuan dari Kementerian Sosial Sehingga menyulitkan melakukan pendataan Fakir Miskin yang mendapat Bantuan
1.2	Rujukan Anak-anak Terlantar	10 Orang	0	0%	
2	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Upgrade Alat Bantu dengan yang jauh lebih optimal sehingga mengurangi kuota pembelian alat bantu karena harga alat bantu yang lebih fungsional jauh lebih mahal dari yang sebelumnya telah di anggarakan
2.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2000 Orang	347 Orang	17%	Dilaksanakan dengan baik, walaupun belum mencapai target
2.2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	200 Orang	0	0%	
2.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	400 Keluarga	124 Orang	31%	Dilaksanakan dengan baik, walaupun belum mencapai target
2.4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	400 Keluarga	124 Orang	31%	Dilaksanakan dengan baik, walaupun belum mencapai target
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					



1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
1.1	Penyediaan Makanan	206 Orang	32 Orang	15%	Belum dilaksanakan sesuai target
1.2	Penyediaan Sandang	30 Orang	32 Orang	106%	Belum dilaksanakan sesuai target
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	2 Kali			
2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	24 Orang	47 Orang	195%	Sudah cukup baik dalam koordinasi dengan Taruna Siaga Bencana, Taruna Siaga Bencana Sesuai SK yang berlaku berjumlah 50 Orang dan sesuai target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	66%	Penyusunan Dokumen sedang dilaksanakan sesuai Target
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	0%	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD Telah dan sedang dilaksanakan sesuai Target
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	0%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Telah dan sedang dilaksanakan sesuai Target
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD Telah dan sedang dilaksanakan sesuai Target



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	0%	Koordinasi Dokumen Perubahan DPA SKPD Telah dan sedang dilaksanakan sesuai Target
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	1 Laporan	20%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Telah dan sedang dilaksanakan sesuai Target
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah akan dilaksanakan di akhir tahun
1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
1.9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Data	0	0%	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	23 Orang/bulan	0 Orang/Bulan	0%	Gaji dan Tunjangan sudah dibayarkan sesuai Target
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1312 Dokumen	335 Dokumen	25%	Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD telah dan sedang dilaksanakan sesuai target
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan sesuai target di akhir tahun
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	17 Laporan	8 Laporan	47%	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dalam pelaksanaan sesuai target
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah				



LKjIP TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sedang dilaksanakan sesuai target
3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sedang terlaksana sesuai target
3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	0	0%	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sedang dilaksanakan sesuai target
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
4.1	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	0 Dokumen	0%	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sedang dilaksanakan sesuai target
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	0	0%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Belum dilaksanakan
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
5.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17 Paket	4 Paket	23,5%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor sedang dilaksanakan sesuai target
5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 paket	2 Paket	50%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sedang dilaksanakan sesuai target
5.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	29 Laporan	22,3%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sedang dilaksanakan sesuai target
5.4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Laporan	251 Laporan	12,5%	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sedang dilaksanakan sesuai target
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	3 Unit	0	0%	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau



	Kantor atau Bangunan Lainnya				Bangunan Lainnya telah dilaksanakan sesuai target
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	6 Laporan	25%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sedang dilaksanakan sesuai target
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39 Laporan	3 Laporan	0,76%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sedang dilaksanakan sesuai target
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan telah dilaksanakan sesuai target
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sedang dilaksanakan sesuai target
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38 Unit	0	0%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sedang dilaksanakan sesuai target

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa Pencapaian kinerja dan anggaran pada triwulan II tahun 2026 secara umum belum dapat dikatakan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran belum mencapai realisasi anggarannya dan realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program belum tercapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya belum menghampiri target.



Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. efisiensi sumber daya pada Dinas Sosial sangat baik. ada beberapa Indikator yang capaiannya kurang baik Hal ini disebabkan karena masih kurangnya perencanaan yang matang mengenai pelayanan dasar di program pemberdayaan sosial.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil uraian di atas adalah untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak terlepas dari tersedianya data PPKS terbaru untuk bahan penentuan sasaran serta kerjasama yang baik antar instansi, masyarakat dan pihak pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

B. SARAN

Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kubu Raya dimasa yang akan datang. Masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait didalam daerah maupun luar daerah dalam penanganan PPKS.
2. Menambah Sarana dan Prasarana yang akan digunakan dalam penanganan PPKS.
3. Pimpinan senantiasa mengarahkan dalam upaya pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) secara berkala.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya kami sampaikan, saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna mendukung program Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menjadi lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang.



Tidak lupa kami juga memberikan atensi serta terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya.

Sungai Raya, Juli 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**

Wasilun, S.Ag.,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196708081999031010



Tidak lupa kami juga memberikan atensi serta terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya.

Sungai Raya, Juli 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**



Wasilun, S.Ag., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196708081999031010



Lampiran

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran : Triwulan II Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS DINAS SOSIAL	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	BB (73)	N/A
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	56,05%	N/A

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2026

: **Rp. 5.193.819.930,21,-**

Jumlah Total Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2026

: **Rp. 1.725.738.070,00**

Sungai Raya, Juli 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**

Wasilun, S.Ag., M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196708081999031010